



Kebijakan Amerika Serikat Menyetujui Perjanjian Perdamaian dengan Taliban dan Penarikan Pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Masa Kepemimpinan Donald Trump

Safna Putri Purba, Reni Windiani, Satwika Paramasatya

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The war between the United States and the Taliban has entered two decades. The US eventually dispatched representatives to negotiate with the Taliban. President Donald Trump has also directed that his troops leave Afghan territory at regular intervals. The negotiation process between the US and the Taliban was tense, but an agreement was eventually reached. Both parties signed the peace agreement in Doha, Qatar, on February 29, 2020. As such, why did the United States, under President Donald Trump's leadership, reach a peace agreement with the Taliban and withdraw American troops from Afghanistan? The purpose of this study is to explain his study employs explanatory research and neoclassical realism theory to identify the factors that influence foreign policy. The result of this study is that the United States' policy to make peace with the Taliban and withdrawal from Afghanistan is the influence of NATO and explains by domestic influence the perception of Trump towards the conflict in Afghanistan.

Keywords: *Afghanistan, United States, Donald Trump, Taliban, peace*

PENDAHULUAN

Perang di Afghanistan menjadi perang terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Kejadian 9/11 yang mengakibatkan runtuhnya gedung *World Trade Center* (WTC) dan juga gedung Pentagon di Amerika Serikat pada 11 September 2001 silam menjadi titik awal pertempuran Amerika Serikat terhadap tindak terorisme. Kelompok teroris yang menjadi incaran Amerika yang saat itu berada di Afghanistan kemudian menjadikan Afghanistan sebagai fokus Amerika dalam *Global War on Terrosim* (Williams, 2008, p. 90). Sudah hampir menjelang dua dekade sejak kejadian 9/11 terjadi dan Amerika Serikat sudah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak empat kali yakni George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump dan Joe Biden, dari keempat pemimpin yang berbeda tersebut memiliki perbedaan kebijakan masing-masing terhadap Afghanistan dalam memerangi terorisme. Pada masa kepemimpinan Donald Trump terdapat perbedaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Apabila pada presiden terahulu belum ada

perjanjian untuk benar-benar berdamai, maka pada kepemimpinan Donald Trump ini terdapat sebuah perjanjian perdamaian yang cukup mengejutkan. Pada masa kepemimpinan Donald Trump, sebuah harapan untuk perdamaian di Afghanistan tercapai dimana saat Presiden Afghanistan menemui Trump di gedung putih, Trump sempat mengatakan lebih menginginkan jalur dialog daripada peperangan. Trump berkata, jika memilih jalur itu maka Afghanistan bisa terhapus dari muka bumi (Kompas, 2019).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas bagaimana dinamika konflik yang terjadi di Afghanistan. Seperti pada penelitian skripsi milik Inayah Sasi Kirana dalam tulisannya yang berjudul “Analisa Penarikan Mundur Pasukan Amerika Serikat Di Afghanistan Tahun 2018.” menjelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan. Lebih spesifiknya membahas penarikan 5.400 pasukan setelah adanya dialog antara Amerika Serikat dan Taliban di tahun 2018. Penelitian tersebut memuat alasan Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, karena dengan begitu Amerika Serikat dapat mengefisiensi biaya militernya di Afghanistan (Kirana, 2019). Selanjutnya pada skripsi milik Marza Nanda Aldinata yang berjudul “Faktor Internasional Sebagai Latarbelakang Kebijakan Amerika Serikat dalam Penangguhan Penarikan pasukan Militer Di Afghanistan Tahun 2014-2016” . Adapun penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama menangguk penarikan pasukan karena sebelumnya sudah terjadi adanya kebangkitan Taliban dan Al-Qaeda sehingga mengancam keamanan Afghanistan, sehingga Presiden Afghanistan Ashraf Ghani membujuk Obama untuk melakukan penarikan pasukan secara fleksibel dan berakhir dengan terciptanya Bilateral Security Agreement yang mana mengatur masalah kelanjutan keterlibatan Amerika Serikat dan sekutu termasuk pasukan militer di dalamnya (Aldinata, 2018). Keberadaan Taliban memang sulit untuk ditumpas, seperti yang ditulis oleh Anisa Yulianty dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Taliban Dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat Pasca Jatuhnya Rezim Taliban Di Afghanistan (2007-2013).” Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Taliban memiliki banyak strategi seperti strategi jaringan, memperhatikan aspek politik, dan strategi lainnya yang didominasi oleh strategi yang bersifat koersif. Berbagai macam strategi dan taktik yang dimiliki oleh Taliban tersebut dianggap dapat mengimbangi lawannya malah membuat kewalahan Amerika Serikat dan pasukan asing lainnya (Yulianty, 2015).

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang menganalisis terkait perkembangan terbaru dimana Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang berhasil mencapai perjanjian damai dengan Taliban dan bertekad kuat untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Belum terdapat penelitian yang menganalisis alasan dibalik kebijakan tersebut dengan menggunakan perspektif realisme neoklasik yang menganalisis melihat faktor sistem internasional dan faktor domestik yang mempengaruhi suatu negara membuat kebijakan luar negerinya. Melalui penelitian ini maka penulis akan menganalisis alasan mengapa Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump melakukan perjanjian damai dengan Taliban dan menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

Untuk melakukan analisis, penulis menggunakan teori realisme neoklasik sebagai kerangka pemikiran. Realisme neoklasik sendiri merupakan teori hubungan internasional yang lebih spesifik berupaya menggabungkan elemen-elemen neorealisme dan realisme klasik. Realisme neoklasik sendiri merupakan teori yang lebih fokus terhadap kebijakan

luar negeri. Agar dapat memahami perilaku negara di pentas internasional, teori ini memasukkan variabel struktur-anarki dan distribusi kapabilitas dan variabel unit faktor-faktor domestik negara. Teori ini percaya bahwa struktur internasional merupakan *driving force* perilaku negara. Tetapi hanya mengacu pada satu struktur saja tidak cukup sebab tidak semua negara berperilaku seragam. Variasi kebijakan luar negeri terjadi karena setiap negara memiliki respon yang beragam terhadap *structure constraint* (Rosyidin, 2020, p. 35). Teori Realisme Neoklasik ini merupakan teori yang akan menjelaskan mengapa, bagaimana dan dalam kondisi yang seperti apa suatu negara mengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan luar negerinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut realisme neoklasik meyakini jawabannya ada pada karakter domestik negara yang bersangkutan dalam menanggapi tekanan dari sistem internasional. Adapun karkter domestik yang dimaksud adalah kapasitas lembaga politik militer, pengaruh aktor-aktor domestik dan kelompok kepentingan, derajat otonomi negara dari masyarakatnya dan tingkat kohesi elit atau masyarakat (Lobell, Ripsman, & Taliaferro, 2009).). Rose Gideon juga menambahkan, apabila hendak menganalisis Kebijakan luar negeri dapat dianalisis dengan melihat bagaimana sistem internasional yang berlaku dan melihat bagaimana sistem internasional itu berimplikasi terhadap suatu negara yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku negara tersebut. Para penganut realisme lainnya setuju dengan pendapat tersebut dan menambahkan bahwa ambisi dan ruang lingkup kebijakan luar negeri itu ditentukan oleh posisi negara dalam sistem internasionalnya serta kekuatan materi relatif atau kapabilitas seperti di bidang ekonomi, sosial, sumber daya alam dan militer dari suatu negara (Rose, 1998, pp. 146-147).

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dari keputusan Amerika Serikat yang pada akhirnya menyetujui perjanjian perdamaian dengan Taliban dan menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dari sudut pandang realisme neoklasik. Dengan menggunakan teori realisme neoklasik ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat bersedia berdamai dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan. Seperti halnya faktor sistem internasional yang berlaku pada era Trump yang pada akhirnya mempengaruhi Amerika Serikat untuk membuat kebijakan luar negeri untuk berdamai dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan.

PEMBAHASAN

Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban resmi ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2020 setelah berbulan-bulan negosiasi diadakan di Qatar dan ini menandai berakhirnya peperangan. Dalam kasus ini pemerintah Afghanistan akan terlibat dengan Dewan Keamanan PBB untuk menghapus anggota Taliban dari daftar sanksi (Al Jazeera, 2020). Pertemuan di Doha kala itu menghasilkan empat lembar total dari draft perjanjian perdamaian yang berjudul "*Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America.*" Dalam dokumen tersebut memuat keempat isi perjanjian diantaranya; (1) Jaminan dan mekanisme penegakan yang akan mencegah penggunaan tanah Afghanistan oleh kelompok atau individu mana pun yang mengganggu keamanan Amerika Serikat dan sekutunya, (2) Jaminan, mekanisme penegakan, dan pengumuman batas waktu penarikan semua pasukan

asing dari Afghanistan, (3) Setelah pengumuman jaminan untuk penarikan penuh pasukan asing dan jadwal di hadapan saksi internasional, dan jaminan dan pengumuman di hadapan saksi internasional bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya, Imarah Islam Afghanistan yang tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara dan dikenal sebagai Taliban akan memulai negosiasi intra-Afghanistan dengan pihak Afghanistan pada 10 Maret 2020, yang sesuai dengan 15 Rajab 1441 pada penanggalan Imlek Hijriah dan Hoot 20, 1398 pada kalender Surya Hijriah. Dan (4) Gencatan senjata permanen dan komprehensif akan menjadi salah satu agenda dialog dan negosiasi intra-Afghanistan. Para peserta negosiasi intra-Afghanistan akan membahas tanggalnya dan modalitas gencatan senjata permanen dan komprehensif, termasuk mekanisme implementasi bersama, yang akan diumumkan bersamaan dengan penyelesaian dan kesepakatan atas peta jalan politik Afghanistan di masa depan (U.S Department of State, 2020).

Sebagaimana Amerika Serikat telah menyepakati untuk menarik pasukannya, langkah pertama yang dilakukan AS adalah dengan mengurangi sebanyak 8.600 pasukannya. Penarikan pertama ini dilakukan dari lima pangkalan militer dalam 135 hari pertama sejak perjanjian disepakati yang dimana diprediksi akan berakhir pada tanggal 13-14 Juli 2020. Setelah tahap pertama penarikan pasukan tersebut selesai maka akan dilanjutkan berangsur-angsur selama kurang lebih 9 bulan. Urusan penarikan pasukan ini akan terus berjalan tanpa menghiraukan pencapaian Taliban untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintahan Afghanistan. Karena menurut pejabat senior pemerintahan AS, pada akhirnya itu terserah pihak Afghanistan untuk menentukan jalan negosiasi intra-Afghanistan. Penarikan pasukan ini hanya akan bergantung pada komitmen Taliban tentang kontraterorisme, Taliban harus benar-benar memastikan tanah Afghanistan tidak digunakan untuk kegiatan yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat. Lebih lanjutnya lagi pejabat tersebut menegaskan bahwa tidak ada yang terjadwal dalam urusan di Afghanistan. Ini menandakan penarikan pasukan bersifat aspirasional (SIGAR, 2020). Kondisi ini membuat Amerika Serikat terlihat tidak ingin ikut campur lagi dalam permasalahan antara pemerintahan Afghanistan dengan Taliban. Amerika Serikat hanya mementingkan keamanan nasionalnya yang mana memang menjadi prioritas utama dari Presiden Donald Trump.

Berikut faktor yang melatarbelakangi kebijakan Amerika Serikat menyetujui perjanjian perdamaian dengan Taliban dan penarikan pasukan dari Afghanistan:

Pengaruh Sistem Internasional / Struktur yang Berlaku

Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki peranan penting dalam tatanan internasional atau sering disebut sebagai negara adidaya. Maka dari itu Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan statusnya sebagai negara hegemon. Dalam realisme neoklasik juga menyebutkan bahwa negara memiliki kepentingan untuk terus mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional yang anarkis. Seperti yang dijelaskan oleh Gideon Rose bahwa kebijakan luar negeri dapat dianalisis dengan melihat bagaimana sistem internasional yang berlaku dan melihat bagaimana sistem internasional itu berimplikasi terhadap suatu negara yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku negara tersebut (Rose, 1998). Salah satu faktor sistem internasional yang berpengaruh ialah hubungan antara NATO dengan Amerika Serikat yang tidak harmonis yang kemudian mempengaruhi perspektif Amerika Serikat dalam memutuskan kebijakan luar negerinya.

Selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump menyampaikan kritik mengenai keraguan tentang komitmen Amerika Serikat terhadap NATO. Secara khusus, gagasan yang disampaikan oleh Trump tentang hubungan timbal balik dengan sekutu mereka dimana Amerika Serikat hanya akan membela sekutu jika mereka meningkatkan pengeluaran biaya militer mereka. Hal ini tentu membuat gempar negara-negara sekutu, Trump juga mengecam negara anggota NATO yang gagal memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB, yang ditetapkan selama KTT NATO di Wales pada tahun 2014 silam. Pernyataan Trump mengenai NATO yang sudah 'usang' ini menjadi polemik di kalangan konservatif maupun progresif Amerika Serikat (Wisniewski, 2017).

Ketidakpuasan Amerika Serikat terhadap NATO tak luput dari pembagian beban yang dianggap tidak adil dan malah merugikan Amerika Serikat. Kriteria Presiden Trump untuk menilai kontribusi negara-negara anggota NATO yang paling mutlak adalah membayar tagihan pengeluaran pertahanan. Kemudian kriteria inilah yang menjadi permasalahan utama NATO di tahun-tahun mendatang. Kritik ini banyak dilontarkan kepada anggota negara-negara Eropa dimana terdapat pengakuan luas di Eropa bahwa pertahanan telah diabaikan terlalu lama sebab adanya perubahan lingkungan keamanan yang menjadi faktor pendorong dalam memprioritaskan keamanan dan pertahanan (Leeuwen, 2017). Mengenai anggaran, sebagian besar mitra NATO Eropa tidak menginvestasikan bagian yang disepakati selama bertahun-tahun. Inilah yang menjadi kritikan keras dari Amerika Serikat terhadap NATO.

Pada saat KTT NATO di Wales tahun 2014, bagian AS dari total pengeluaran pertahanan NATO mencapai 73 persen. Angka tersebut terlampau tinggi dan tidak proporsional terlihat dari fakta bahwa bagian AS dari total PDB NATO secara signifikan lebih rendah di lebih dari 45 persen. Kemudian saat Trump menjabat, pada KTT NATO tahun 2018 menyampaikan keluhannya. Trump tidak segan untuk menegur para pemimpin beberapa sekutu karena gagal dalam komitmen pertahanan mereka. Jerman salah satunya, 'pengeluarannya yang rendah untuk pertahanan' dipandang sebagai 'merusak keamanan aliansi'. Keadaan di mana 'beberapa negara tidak berbagi beban keamanan kolektif NATO' 'tidak lagi berkelanjutan' bagi AS, tegas Trump. Di KTT itu sendiri, Trump, tanpa peringatan, menyarankan bahwa target pengeluaran pertahanan NATO harus meningkat menjadi 4 persen dari PDB, dan bahwa semua sekutu harus meningkatkan pengeluaran mereka pada Januari 2019 jika tidak 'Amerika Serikat akan melakukannya sendiri'. Amerika Serikat secara tidak langsung mengutarakan niatannya untuk keluar dari NATO. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa keamanan Amerika sendiri tidak akan terkikis secara serius jika meninggalkan NATO juga tidak perlu menggunakan sistem aliansi alternatif. AS dapat mengandalkan kemampuan pertahanan nasionalnya yang cukup sambil memanfaatkan keuntungan yang bisa didapat dari melepaskan kewajiban untuk membela sekutunya yang membutuhkan (Sperling & Webber, 2019).

Keterlibatan NATO di Afghanistan juga dikritik oleh Amerika Serikat dimana upaya tersebut dinilai belum mampu untuk menyelesaikan konflik. Situasi yang terjadi di lapangan membuat Amerika Serikat tidak optimis dengan upaya yang telah dilakukan NATO. Amerika Serikat terlibat dalam konflik militer terpanjang dalam sejarah mereka yang mencapai jalan buntu. Keterlibatan anggota NATO juga dirasa tidak memberi kontribusi cukup seperti yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Terdapat negara anggota NATO yang tidak berpartisipasi dalam upaya kolektif di Afghanistan dan malah

mengurangi kontribusi. Salah satu dari organisasi yang diinisiasi oleh NATO yakni RSM merupakan misi non-tempur dan jumlah pasukan internasional yang ditempatkan di Afghanistan jauh lebih rendah daripada tahun 2014. Sementara itu Taliban dengan pengaruhnya semakin mendominasi negara tersebut bahkan terdapat perdagangan gelap obat-obatan tetap menjadi perhatian. Namun, bagi banyak negara anggota, konflik di Afghanistan sebagian besar merupakan “perang Amerika” yang terpencil, sementara sekarang mereka menghadapi tantangan penting terorisme dan migrasi tak terkendali yang berasal dari wilayah yang berdekatan di Afrika dan Timur Tengah. Konflik Afghanistan ini tidak terlalu mendesak bagi beberapa negara anggota NATO dan malah menyebabkan korban serta biaya yang meningkat sehingga mempengaruhi sikap mereka terhadap konflik tersebut. (Yu, 2019). Akibatnya, Amerika Serikat mengkritik sekutu NATO sebagai ‘penunggang bebas’ sebab gagal meningkatkan pengeluaran pertahanan secara tajam dan mengirim personel tambahan ke Afghanistan.

Dengan adanya beban yang tidak seimbang dan banyaknya kritik terhadap NATO dari Amerika Serikat, serta prinsip yang diusung Trump untuk mengutamakan kepentingan Amerika Serikat sebagai prioritas utama mempengaruhi kebijakan yang akan diambil untuk menyikapi konflik di Afghanistan. Hubungan antara Amerika Serikat dengan NATO yang kurang baik tersebut, dimana Amerika Serikat memandang bahwa sekutu NATO tidak mengeluarkan usaha yang sama dengan Amerika Serikat sendiri dan memandang bahwa beberapa anggota NATO sebagai penunggang bebas menyebabkan AS kesal dan bahkan berniat untuk meninggalkan NATO itu sendiri. Ketidakefektifan dalam pembagian beban di NATO ini yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab AS mulai berpaling dari kepentingan NATO dan juga kemudian dipengaruhi oleh faktor domestik lainnya, dimana dalam hal ini dipengaruhi oleh persepsi dari Trump sebagai salah satu elit politik AS sebagaimana halnya diamini oleh realisme neoklasik.

Domestik

Dengan banyaknya kritikan dari Presiden Trump akan NATO serta adanya prinsip *America First* kemudian akan mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Di bawah kepemimpinan Trump, Amerika Serikat bermaksud mengurangi keterlibatan Amerika Serikat di panggung internasional (Yuliantoro, 2017). Trump juga percaya bahwa sekutu-sekutu Amerika Serikat memanfaatkan Amerika Serikat untuk menyediakan perlindungan yang murah. Kritik utamanya diarahkan kepada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau sering disebut dengan NATO (the North Atlantic Treaty Organization) organisasi yang Trump anggap sudah ketinggalan zaman. Trump mengecam para anggota NATO yang menggantungkan diri pada Amerika Serikat pada saat itu tanpa memberikan kontribusi yang setimpal bagi Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini sangat merugikan negara adidaya tersebut. Slogan serta esensi dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bertajuk *America First* yang diusung Trump ini yaitu penekanan terhadap nasionalisme dan patriotisme Amerika Serikat, serta janji mengutamakan Amerika Serikat di atas kepentingan negara lain, sekalipun negara tersebut adalah sekutu dari Amerika Serikat. Trump menanggapi aktivitas yang dilakukan oleh Amerika Serikat hanya membantu negara lain dan kurang peduli pada nasib dari Amerika Serikat itu sendiri. Janji mengutamakan kepentingan Amerika Serikat serta sikap tegas terhadap siapapun yang mencoba mengambil keuntungan dari Amerika Serikat ini tampaknya berhasil merebut hati

para pendukung Donald Trump, sehingga dapat mengantarkan Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45 (Umoro, 2018).

Donald Trump melihat bahwa Amerika Serikat mulai semakin menurun ekonominya akibat dari dana yang terus dikucurkan hingga \$3,786 triliun. Penurunan ini tentunya juga menambah kesengsaraan rakyat Amerika Serikat sehingga ini menjadi momentum dan dorongan Trump untuk semakin mewujudkan mimpinya tersebut. Pada pidato pelantikannya di tahun 2017, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa kedepannya prioritasnya akan selalu pada Amerika, Amerika harus yang pertama. Dalam pidatonya Presiden Donald Trump dengan sangat tegas akan memprioritaskan Amerika Serikat:

“My foreign policy will always put the interests of the American people and American security first..... Under a Trump administration, no American citizen will ever again feel that their needs come second to the citizens of a foreign country... we have no choice, we must make America respected again. We must make America truly wealthy again. And we must — we have to and we will make America great again.”(Trump, 2017)

Dengan slogan *America First* ini menjadi sebuah situasi yang berbeda terhadap kebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump. Perubahan itu salah satunya ada pada bagaimana Amerika Serikat memetakan geopolitiknya. Sosok yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan namun memiliki tekad yang tinggi untuk membuat AS berjaya kembali dengan pemilihan kebijakan yang memprioritaskan Amerika serta meningkatkan keamanan terkait kebijakan luar negeri atau yang lebih dikenal dengan “America First.”

Melihat bagaimana NATO sebagai pakta perlindungan yang dibentuk oleh Amerika Serikat semakin berkembang kian merugikan maka sangat bertentangan dengan prinsip Trump yang berambisi kuat untuk terus mementingkan kepentingan Amerika Serikat. Hubungan yang kurang harmonis antara NATO dan Amerika Serikat serta bagaimana keterlibatan NATO dalam penyelesaian konflik Afghanistan yang tidak kunjung menemukan titik terang membuat Amerika Serikat mencari cara lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus terus berlama-lama di Afghanistan dan memerangi Taliban. Sebagaimana kontribusi negara-negara NATO berkurang dalam kasus ini dalam penyelesaian permasalahan di Afghanistan sebab negara-negara NATO diantaranya merasa memiliki ancaman lain yang lebih besar yang harus dihadapi oleh negaranya membuat Trump meragukan eksistensi NATO. Menurutnya NATO masih belum bisa memerangi terorisme ataupun menyelesaikan konflik di Afghanistan. Dari adanya pandangan ini mempengaruhi keputusan Trump untuk menarik pasukannya dari Afghanistan dan melakukan perjanjian damai dengan Taliban.

Maka menarik pasukan dari Afghanistan dan akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan Taliban merupakan jawaban atas kegelisahan Trump terhadap konflik tersebut. Keberadaan Amerika Serikat beserta dengan NATO yang tidak memberikan kepastian akan akhir cerita untuk menyelesaikan konflik membuat Trump memilih cara lain selain terus bertahan di Afghanistan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan jajaran kabinet Trump yakni menteri luar negeri Rex Tillerson yang menganggap bahwa menganggap intervensi yang dilakukan Amerika Serikat yang didasari oleh niat yang baik namun tidak mencapai

stabilitas dan keamanan global yang diinginkan. Intervensi tersebut malah memicu konsekuensi yang tidak diinginkan dan menciptakan ketiakterpastian. Meski tidak menyebutkan secara spesifik namun keberadaan Amerika Serikat di Afghanistan merupakan intervensi terpanjang dalam sejarah dan belum mencapai kepuasan yang Amerika Serikat inginkan (Foreign Senate Gov, 2017). Dilanjutkan lagi dengan persepsi dari menlu setelah Tillerson, Mike Pompeo yang menyebutkan bahwa misi yang hendak dicapai Amerika Serikat di Afghanistan sudah tertunda yakni untuk memburu Al-Qaeda (The Daily Signal, 2019). Sejalan dengan kedua menteri luar negeri, menteri pertahanan Mark Esper yang mendukung inisiasi Trump untuk berdamai dengan Taliban sebab menurutnya berdamai dengan Taliban mungkin menimbulkan banyak resiko, namun bagi Esper keputusan ini sangat menjanjikan (AP News, 2020).

Donald Trump melakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan yang isolasionis, akan tetapi hal ini bukan berarti pendekatan yang akan merusak pandangan tentang keistimewaan sebuah negara. Pada saat terpilih, Trump mencanangkan wacana kepada NATO, dimana Trump menawarkan sebuah program yang baru dan lebih fresh dari yang sebelumnya yang menurutnya tidak konvensional, wacana ini diberi nama "Come Home, America" (Sestanovich, 2017). Trump berpendapat bahwa NATO sudah gagal untuk memperhatikan cara dimana NATO mengadaptasi instrumen kebijakannya sendiri untuk merespon ancaman yang beragam, dimulai dari terorisme (pasca 9/11), sampai dengan pertahanan di dunia maya dan media sosial (Sloan, 2017).

Dari persepsi terhadap NATO serta kebijakan *America First* tersebut, Trump mengisyaratkan untuk melakukan penarikan pasukan militernya, hal ini tentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang di dapat oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat juga mempertimbangkan untuk menggunakan strategi lain selain perang melawan pasukan Taliban di Afghanistan yakni dengan melakukan negosiasi sebagai alternatif Amerika Serikat menghadapi kelompok Taliban.

Faktor struktur dari adanya ketidakpuasan Amerika Serikat terhadap NATO merupakan bentuk dari adanya ketidakpastian dalam sistem internasional yang menyebabkan kurangnya kepercayaan yang pada akhirnya membuat negara satu dan yang lainnya saling mengawasi. Adanya ketidakpastian ini dipersepsikan oleh Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang memiliki latar belakang sebagai pebisnis, Trump memandang hubungan antara Amerika Serikat dan NATO tidak lagi sejalan karena menurutnya negara-negara anggota NATO sebagai 'penunggang bebas', memiliki kontribusi yang cenderung sedikit dan hanya merugikan Amerika Serikat secara finansial. Keberadaan NATO yang kebersamai Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan juga tidak kunjung menemukan garis akhir yang pada akhirnya membuat Trump memutuskan untuk merubah kebijakannya. Bagi Trump segala keterlibatan Amerika Serikat di panggung internasional yang tidak sesuai dengan prinsip 'America First' harus dikaji ulang.

Hal ini selaras dengan asumsi dari realisme neoklasik yang memandang bahwa integrasi antara sistem internasional dan unit (domestik) mempengaruhi bagaimana kebijakan suatu negara. Dalam hal ini, hubungan antara AS dan NATO menimbulkan ketidakpastian di panggung internasional yang anarki ini. Hubungan yang kurang baik ini yang kemudian dipersepsikan oleh Trump yang notabenehnya salah satu elit politik (domestik) memandang bahwa komitmen tersebut justru membuat AS merugi dan jauh dari

kepentingan domestiknya. Dan ini yang kemudian mendorong AS untuk menarik pasukannya dari Afghanistan dan berdamai dengan Taliban merupakan upaya yang tepat untuk menyelamatkan Amerika Serikat dari konflik berkepanjangan yang hanya merugikan Amerika Serikat.

KESIMPULAN

Perdamaian Amerika Serikat dengan Taliban dan penarikan pasukan dari Afghanistan memerlukan waktu yang lama untuk bisa tercapai. Di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump hal tersebut dapat terealisasi. Perjanjian yang disepakati merupakan tuntutan Amerika Serikat untuk Taliban berkomitmen agar tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat untuk kegiatan terorisme dan juga tuntutan dari Taliban agar Amerika Serikat segera menarik pasukan dari negara mereka. Selain memang merupakan tuntutan dari Taliban, penarikan pasukan dari Afghanistan juga merupakan bentuk dari adanya pengaruh struktur yang dimana dalam pandangan Amerika Serikat NATO hanya memberatkan finansial AS dan belum mampu mencapai tujuan mereka dalam konflik Afghanistan.

Berdasarkan realisme neoklasik, negara akan membuat kebijakan luar negeri berdasarkan pada pengaruh struktur atau sistem internasional yang ada untuk menentukan perilakunya. Maka dalam hal ini pengaruh dari NATO yang dirasa merugikan Amerika Serikat dan eksistensinya di Afghanistan tidak kunjung membuahkan hasil dalam penyelesaian konflik membuat Presiden Donald Trump mengambil langkah lain untuk penyelesaian konflik di Afghanistan dan demi mengutamakan kepentingan Amerika Serikat seperti prinsip awal sejak terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat 'America First'. Yang mana pada akhirnya Amerika Serikat memilih untuk berdamai dengan Taliban dan menarik pasukannya dari Afghanistan sebagai alternatif lain dalam menghadapi konflik di Afghanistan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta Ibu Dr.Dra. Reni Windiani, M.S. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Satwika Paramasatya S.IP, M.A selaku dosen pembimbing 2, serta Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Al Jazeera. (2020). *Afghanistan's Taliban, US sign agreement aimed at ending war*. Diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/29/afghanistans-taliban-us-sign-agreement-aimed-at-ending-war>
- Aldinata, M. N. (2018). *Faktor Internasional Sebagai Latarbelakang Kebijakan Amerika Serikat dalam Penanggulangan Penarikan pasukan Militer Di Afghanistan Tahun 2014-2016*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18703>
- AP News. (2020). *Esper says Taliban deal is promising but not without risk*.

- Foreign Senate Gov. (2017). *Secretary of State Designate Rex Tillerson: Senate Confirmation Hearing Opening Statement* .
- Kirana, I. S. (2019). *Analisa Penarikanmundur Pasukan Amerika Serikat di Afghanistan Tahun 2018*. Yogyakarta.
- Kompas. (2019). *Trump: Jika Saya Mau Perang, Afghanistan Bisa Terhapus dari Muka Bumi Ini*.
- Leeuwen, M. v. (2017). NATO and the War on Terror. *Atlantisch Perspectief* , 2017, Vol. 41, No. 3, 14-18.
- Lobell, S. E., Ripsman, N. M., & Taliaferro, J. W. (2009). *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, vol. 51, no. 1. <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Hingga Non-Barat*. Depok: Rajawali Pers.
- Sestanovich, S. (2017). *The Brilliant Incoherence of Trump's Foreign Policy*. Diambil kembali dari The Atlantic: <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/05/thebrilliant-incoherence-of-trumps-foreign-policy/521430/>
- SIGAR. (2020). *Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction: April 30 2020*.
- Sloan, S. R. (2017, June 8). *Policy Series: Donald Trump and NATO: Historic Alliance Meets Ahistoric President*. Diambil kembali dari The International Security Studies Forum: <https://issforum.org/roundtables/policy/1-5am-nato>
- Sperling, J., & Webber, M. (2019). Trump's foreign policy and NATO. *Review of International Studies*, vol. 45, no. 3, 511-526.
- The Daily Signal. (2019). *EXCLUSIVE: Pompeo Says US 'Delivered' on Mission in Afghanistan*. The Daily Signal.
- United States Embassy. (2020). *Agreement For Bringing Peace to Afghanistan Between the Islamic Emirate of Afghanistan*. (<https://qa.usembassy.gov/agreement-for-bringing-peace-to-afghanistan/>)
- Utomo, H. F. (2018, July 31). *Pertemuan Rahasia Taliban dan Pejabat AS di Qatar, Berdamai?* Diambil kembali dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/global/read/3605372/pertemuan-rahasia-taliban-dan-pejabat-as-di-qatar-berdamai>
- Williams, P. (2008). *Security Studies an Introduction*. New York: Routledge.

- Wisniewski, B. (2017). *Impatient and Distracted: The United States and NATO Under Trump*. Diambil kembali dari Council of Councils: [cfr.org/councilofcouncils/global-memos/impatient-and-distracted-united-states-and-nato-under-trump](https://www.cfr.org/councilofcouncils/global-memos/impatient-and-distracted-united-states-and-nato-under-trump)
- Yu, B. (2019). The member states' contributions to NATO's policy in Afghanistan during Donald Trump presidency. *Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations*, 2019, vol. 12, issue 1, 45.
- Yulianty, A. (2015). *Strategi Taliban dalam Menghadapi Tekanan Amerika Serikat Pasca Jatuhnya Rezim Taliban di Afghanistan (2007-2013)*. Skripsi, UPN Veteran Jakarta. Diakses dari <https://repository.upnvj.ac.id/3659/>
- Yuliantoro, N. R. (2017). Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2). Dipetik June 3, 2022, dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2228>